



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025**

TENTANG

**HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN *SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE* (SAQ)
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lembaga/Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, serta Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur;
- c. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) pada badan publik di Jawa Timur;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tentang Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 /BA/KI-Prov.Jatim/IX/2025 Tanggal 2 September 2025.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025 berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Menetapkan badan publik di Jawa Timur yang mengisi dan submit *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) melalui website <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jatim> sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) yang terdiri dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 52 (lima puluh dua) Badan Publik, Pemerintah Kabupaten/Kota 38 (tiga puluh delapan) Badan Publik, Lembaga/Instansi vertikal di Jawa Timur 10 (sepuluh) Badan Publik, BUMD Pemprov Jawa Timur 2 (dua) Badan Publik dan Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur 40 (empat puluh) Badan Publik.
- KETIGA : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO

Lampiran 1
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Sekretariat DPRD	98.28
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.28
3.	Dinas Lingkungan Hidup	97.71
4.	RSUD dr. Soetomo	97.71
5.	RSUD dr. Saiful Anwar	97.71
6.	Rumah Sakit Menur	97.14
7.	Rumah Sakit Paru Jember	96.57
8.	RSUD dr. Soedono	95.57
9.	RSUD Dungus	95.42
10.	Dinas Sosial	92
11.	Dinas Kesehatan	91.42
12.	RSUD Daha Husada	91.28
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	88.85
14.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	88.85
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.57
16.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang	86.28
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	86
18.	RSUD Husada Prima	85.71
19.	RSUD Karsa Husada	84.57
20.	Rumah Sakit Paru Mangunharjo	83.71
21.	RSUD Haji	82.28
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.85
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan	81.42
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.85
25.	RSUD Sumberglagah	80.57
26.	RSUD Mohammad Noer	80
27.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	76
28.	Rumah Sakit Mata Masyarakat	71.14

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
29.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	68.28
30.	Badan Penghubung	61.42
31.	Dinas Pendidikan	55.14
32.	Biro Umum	55.14
33.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro	53.42
34.	Dinas Perhubungan	53.14
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.14
36.	Dinas Kehutanan	45.85
37.	Biro Kesejahteraan Rakyat	45.71
38.	Dinas Peternakan	42.71
39.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.85
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.28
41.	Biro Administrasi Pembangunan	40
42.	Badan Kepegawaian Daerah	39.14
43.	Biro Perekonomian	35
44.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	34.57
45.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	34.57
46.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31.28
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	25.71
48.	Biro Hukum	24.28
49.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember	22.85
50.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	22.42
51.	Biro Organisasi	16.85
52.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7.71

Lampiran 2
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	100
2.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	100
3.	Pemerintah Kota Madiun	100
4.	Pemerintah Kota Surabaya	100
5.	Pemerintah Kota Blitar	99.71
6.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	99.14
7.	Pemerintah Kabupaten Jember	98.85
8.	Pemerintah Kota Mojokerto	98.85
9.	Pemerintah Kota Probolinggo	98.85
10.	Pemerintah Kabupaten Magetan	98
11.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	95.71
12.	Pemerintah Kabupaten Blitar	95
13.	Pemerintah Kota Batu	94.85
14.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	94.57
15.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	92.28
16.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	89.85
17.	Pemerintah Kota Malang	89.71
18.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	86.57
19.	Pemerintah Kabupaten Tuban	85.42
20.	Pemerintah Kota Pasuruan	83.42
21.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	82.28
22.	Pemerintah Kabupaten Gresik	80.57
23.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	77.28
24.	Pemerintah Kota Kediri	75.57
25.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	74.28
26.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	71
27.	Pemerintah Kabupaten Kediri	70.57
28.	Pemerintah Kabupaten Malang	68
29.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	62.14

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
30.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	60.57
31.	Pemerintah Kabupaten Jombang	57.42
32.	Pemerintah Kabupaten Sampang	57.14
33.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	48.28
34.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	46.57
35.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	44.85
36.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	38.85
37.	Pemerintah Kabupaten Madiun	37.14
38.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	22.42

Lampiran 3

Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim

Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025

Tanggal : 3 September 2025

Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI LEMBAGA/INSTANSI VERTIKAL DI JAWA TIMUR

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	BKKBN Jawa Timur	100
2.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	98.85
3.	Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur	97.42
4.	BPK RI Perwakilan Jawa Timur	96.57
5.	Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur	92.57
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur	80.85
7.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII	74.14
8.	BASARNAS Surabaya	58.28
9.	BMKG Malang	52.28
10.	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	10.28

Lampiran 4
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMPROV. JATIM

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	82.14
2.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur)	22.42

Lampiran 5

Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim

Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025

Tanggal : 3 September 2025

Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.**KATEGORI PEMERINTAH DESA MANDIRI DI JAWA TIMUR**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Pemerintah Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	93.71
2.	Pemerintah Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	93.71
3.	Pemerintah Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro	92.57
4.	Pemerintah Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	92.57
5.	Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember	90
6.	Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk	89.71
7.	Pemerintah Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk	88.57
8.	Pemerintah Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan	87.42
9.	Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun	81.14
10.	Pemerintah Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan	80.85
11.	Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember	80.85
12.	Pemerintah Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar	80.85
13.	Pemerintah Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban	80.28
14.	Pemerintah Desa Simoangin-Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo	80
15.	Pemerintah Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar	80
16.	Pemerintah Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	75.71
17.	Pemerintah Desa Blimbinggede, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro	72.85
18.	Pemerintah Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang	69.14
19.	Pemerintah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember	65.14

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
20.	Pemerintah Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo	64.57
21.	Pemerintah Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang	62.57
22.	Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	61.42
23.	Pemerintah Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban	60.28
24.	Pemerintah Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban	55.14
25.	Pemerintah Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto	52.85
26.	Pemerintah Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo	52.57
27.	Pemerintah Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	50.85
28.	Pemerintah Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember	44.57
29.	Pemerintah Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun	42.85
30.	Pemerintah Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang	42.28
31.	Pemerintah Desa Kedung Sumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik	28.85
32.	Pemerintah Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang	21.71
33.	Pemerintah Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan	17.14
34.	Pemerintah Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto	15.42
35.	Pemerintah Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun	14.85
36.	Pemerintah Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan	13.71
37.	Pemerintah Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri	12.28
38.	Pemerintah Desa Kematren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto	6
39.	Pemerintah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	4.28
40.	Pemerintah Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan	2.28